

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIPIKAT TANAH
ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Syahrul Hermawan

NIT. 22314497

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The rapid development of information technology has driven Indonesia's Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to implement Electronic Land Certificates as part of the digital transformation of land administration services. However, the success of this policy depends heavily on public perception and acceptance, particularly in regions with diverse social characteristics and digital literacy levels such as Pandeglang Regency. This study aims to describe the public perception of Pandeglang Regency's community toward the implementation of Electronic Land Certificates, based on the aspects of attitude, interest, experience, motivation, and expectation. A descriptive quantitative approach was employed through a survey method involving 100 respondents, determined using the Lemeshow formula with a random sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics, namely mean values and standard deviation. The results show that public perception of the Electronic Land Certificate is generally positive, with an overall mean score of 4.02. The Attitude indicator obtained the highest score (4.48; Very Positive), followed by Expectation (4.34; Very Positive), Motivation (4.09; Positive), and Interest (4.07; Positive), while the Experience indicator recorded the lowest score (3.12; Fair). These findings indicate that although the public welcomes and holds high expectations for this policy, direct usage experience remains limited, highlighting the need for improved outreach, education, and assistance to ensure the benefits of the Electronic Land Certificate are felt evenly across the community.

Keywords: public perception, electronic land certificate, digital transformation, land administration services, Pandeglang Regency

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
Bab II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Penelitian Terdahulu.....	7
2. Landasan Teori	12
2.1 Persepsi Masyarakat	12
2.2 Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan	13
2.3 Sertipikat Tanah Elektronik	14
2.4 Infrastruktur Informasi Pertanahan	19
2.5 Keamanan Digital	19
2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat.....	20
2.7 Analisis Kritis	21
2.8 Sintesis Teori sebagai Dasar Penyusunan Instrumen Penelitian	23
3. Kerangka Pemikiran	27
Bab III	29
METODE PENELITIAN.....	29
1. Format Penelitian	29

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3. Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel.....	30
4. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	32
5. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
6. Analisis Data	39
1. Editing	39
2. Coding	39
3. Scoring.....	40
4. Tabulasi Data.....	40
5. Uji Instrumen Penelitian.....	40
6. Analisis Statistik Deskriptif.....	41
7. Interpretasi Hasil	42
8. Penarikan Kesimpulan.....	42
Bab IV	43
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang.....	43
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	45
3. Karakteristik Responden	47
Bab V	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Hasil Uji Instrumen	50
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	53
1. Sikap.....	54
2. Minat	55
3. Pengalaman	57
4. Motivasi.....	59
5. Harapan	60
6. Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Deskriptif	62
7. Analisis Rekapitulasi Statistik Deskriptif Berdasarkan Mean dan Standar Deviasi	64
3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
1. Pembahasan Berdasarkan Teori Persepsi Walgito.	66

2. Pembahasan Berdasarkan Teori Robbins dan Judge	67
3. Pembahasan Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM)	68
4. Pembahasan Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023	69
5. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	69
6. Kesimpulan Pembahasan.....	70
Bab VI.....	72
KESIMPULAN & SARAN	72
1. Kesimpulan.....	72
2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
Peraturan Peraturan	76
LAMPIRAN.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam administrasi pertanahan adalah implementasi sertipikat tanah elektronik. Di Indonesia, transformasi digital dalam pengelolaan administrasi pertanahan mulai diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui peluncuran program sertipikat tanah elektronik yang bertujuan untuk menggantikan sertipikat tanah konvensional berbasis kertas. (Habibi, Prambudi, Trisnawati, & Wulandari, 2025). Namun, di tengah upaya modernisasi tersebut, muncul berbagai dinamika di tingkat masyarakat, khususnya terkait dengan persepsi, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik, seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

Pada tataran praktis, masyarakat Kabupaten Pandeglang dihadapkan pada perubahan sistem administrasi pertanahan yang sebelumnya berbasis dokumen fisik menjadi dokumen digital. Berdasarkan Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2026, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Pandeglang mencapai 569.654 orang, dengan 180.634 orang bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 103.341 orang pada sektor Industri Pengolahan, dan 285.679 orang pada kelompok Jasa Lainnya (BPS, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, termasuk pada sektor-sektor yang masih bergantung pada aktivitas lapangan dan pelayanan administrasi secara langsung. Keragaman karakteristik sosial ekonomi tersebut dapat memengaruhi tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima transformasi pelayanan pertanahan berbasis digital.

Perubahan sistem administrasi pertanahan dari dokumen fisik menuju dokumen elektronik tidak hanya menuntut adaptasi dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial. Sebagian masyarakat masih merasa lebih aman dan nyaman menggunakan sertipikat tanah berbentuk fisik yang dapat disimpan dan

diperlihatkan secara langsung dibandingkan dengan sertipikat elektronik. Kekhawatiran ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai keunggulan, keamanan, serta prosedur penggunaan sertipikat tanah elektronik, sehingga menimbulkan keraguan dan resistensi terhadap inovasi digital ini (Jagadhita, 2025).

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait infrastruktur pendukung di Kabupaten Pandeglang yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi sistem elektronik secara optimal. Keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital menjadi tantangan tersendiri dalam proses transformasi administrasi pertanahan. Hal ini berdampak pada munculnya persepsi negatif di kalangan masyarakat, seperti ketidakpercayaan terhadap keabsahan dokumen elektronik, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan data, serta keraguan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pertanahan. (Jagadhita, 2025).

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN berupaya meyakinkan masyarakat bahwa sertipikat tanah elektronik memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sertipikat konvensional. Sertipikat elektronik diklaim lebih aman karena dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, lebih efisien dalam proses administrasi, serta meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akibat bencana alam atau kelalaian manusia. Selain itu, digitalisasi sertipikat tanah juga diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan pertanahan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi praktik-praktik korupsi dan pungutan liar yang selama ini kerap terjadi dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara manual. (Jagadhita, 2025).

Namun, keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru ini. Persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan apakah inovasi ini dapat berjalan dengan efektif atau justru menimbulkan resistensi yang berujung pada kegagalan program.

Di Kabupaten Pandeglang, persepsi masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji, mengingat karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang unik. Kabupaten Pandeglang

merupakan daerah yang masih didominasi oleh masyarakat tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan akses terhadap informasi yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses adopsi teknologi baru, termasuk sertipikat tanah elektronik, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak masyarakat yang masih memerlukan waktu dan pendampingan untuk dapat memahami dan menerima perubahan sistem administrasi pertanahan ini. (Jagadhita, 2025).

Selain itu, adanya kasus-kasus penipuan atau pemalsuan dokumen elektronik di beberapa daerah juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Masyarakat menjadi semakin waspada dan cenderung skeptis terhadap keamanan sertipikat tanah elektronik. Mereka khawatir jika data pertanahan mereka dapat dengan mudah diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan adanya berita-berita negatif di media massa mengenai kebocoran data dan serangan siber yang menimpa institusi pemerintah di Indonesia. (Jagadhita, 2025).

Di tengah berbagai tantangan dan kekhawatiran tersebut, terdapat pula kelompok masyarakat yang mulai menyadari pentingnya transformasi digital dalam bidang pertanahan. Mereka melihat sertipikat tanah elektronik sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan administrasi pertanahan, seperti proses yang lambat, biaya yang tinggi, serta maraknya praktik pungutan liar. (Setiawati, Danar P., Natasha, & Nuralisha, 2021) Kelompok masyarakat ini umumnya berasal dari kalangan muda, berpendidikan, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik di Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan strategi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih efektif, sehingga implementasi sertipikat tanah elektronik dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik di bidang pertanahan. Dengan memahami persepsi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual di lapangan, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi yang rasional dan aplikatif untuk mendukung keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik di Kabupaten Pandeglang.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik berdasarkan sikap, minat, pengalaman, motivasi, dan harapan?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik berdasarkan sikap, minat, pengalaman, motivasi, dan harapan

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik berdasarkan aspek sikap, minat, pengalaman, motivasi, dan harapan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang administrasi pertanahan, khususnya mengenai transformasi digital dalam pelayanan pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji persepsi masyarakat maupun implementasi layanan pertanahan berbasis elektronik dengan pendekatan dan lokasi penelitian yang berbeda.

Manfaat Praktis:

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan berbasis elektronik serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan implementasi sertipikat tanah elektronik kepada masyarakat.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan masyarakat terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program digitalisasi layanan pertanahan serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas implementasi sertipikat tanah elektronik di berbagai daerah.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi sertipikat tanah elektronik beserta persepsi masyarakat terhadap penerapannya. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai layanan pertanahan berbasis elektronik sehingga masyarakat lebih memahami tujuan, manfaat, dan proses penerapan sertipikat tanah elektronik.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital, khususnya di bidang pertanahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan dalam pengembangan variabel, metode penelitian, maupun objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi sertipikat tanah elektronik.

Bab VI

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat terhadap implementasi Sertipikat Tanah Elektronik secara keseluruhan berada pada kategori positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata keseluruhan variabel sebesar 4,02, yang menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan memberikan penilaian yang baik terhadap penerapan Sertipikat Tanah Elektronik sebagai bentuk transformasi digital pelayanan pertanahan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat menilai kebijakan digitalisasi pelayanan pertanahan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan dokumen, transparansi administrasi, serta kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
2. Indikator Sikap memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,48 (Sangat Positif). Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat penerimaan yang sangat baik terhadap kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik. Sebagian besar responden meyakini bahwa digitalisasi pelayanan pertanahan merupakan inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Indikator Harapan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,34 (Sangat Positif). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. Responden berharap layanan pertanahan berbasis elektronik dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, aman, transparan, dan mampu meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
4. Indikator Minat dan Motivasi memperoleh kategori Positif, masing-masing dengan nilai rata-rata sebesar 4,07 dan 4,09. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan dan dorongan yang baik untuk menerima serta memanfaatkan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Tingginya minat dan motivasi masyarakat menunjukkan adanya kesiapan untuk mendukung transformasi digital pelayanan pertanahan.

5. Indikator Pengalaman memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,12 (Cukup) dan menjadi indikator dengan nilai terendah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki sikap, minat, motivasi, dan harapan yang positif, pengalaman mereka dalam menggunakan Sertipikat Tanah Elektronik masih terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Sertipikat Tanah Elektronik belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat karena penerapannya masih berlangsung secara bertahap.
6. Analisis standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen, dengan nilai standar deviasi pada setiap indikator berada pada kisaran 0,55-0,71. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat relatif konsisten dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang terlalu besar antarresponden mengenai implementasi Sertipikat Tanah Elektronik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang memiliki persepsi yang positif terhadap implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. Namun demikian, peningkatan pengalaman masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan perluasan implementasi layanan masih diperlukan agar manfaat Sertipikat Tanah Elektronik dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, prosedur, serta mekanisme penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan di desa dan kecamatan, kerja sama dengan pemerintah daerah, pemanfaatan media sosial, serta penyediaan materi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan pendampingan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan elektronik agar mereka memperoleh pengalaman secara langsung sehingga kepercayaan terhadap sistem dapat semakin meningkat.

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kualitas implementasi Sertipikat Tanah Elektronik melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keamanan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap Kantor Pertanahan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, sehingga proses digitalisasi pelayanan pertanahan dapat berjalan secara efektif, aman, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai Sertipikat Tanah Elektronik serta memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN. Partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan layanan elektronik akan mendukung percepatan transformasi digital pelayanan pertanahan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap manfaat dan keamanan Sertipikat Tanah Elektronik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mengkaji persepsi masyarakat berdasarkan lima indikator, yaitu sikap, minat, pengalaman, motivasi, dan harapan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode campuran (mixed methods) atau pendekatan kualitatif sehingga dapat menggali faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti tingkat literasi digital, kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan, atau kepuasan pengguna, serta memperluas lokasi penelitian agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Atikah, N. (2025). Efektivitas Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Law and Society Review*, 1293-1320.
- avivah, L. n. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. *repository.stpn*, 1-112.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business*. Hoboken, New Jersey (NJ): Wiley.
- BPS. (2026). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2026*. pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang.
- Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 319-340.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 9/10)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan . *Rio Law Jurnal* , 499-507.
- Hamdan, Achmad, A., & Mahbub, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Status Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar . *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 9 (2): 105-113.
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya . *Jurnal USM Law Review Vol 8 No 3*, 1600-1620.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Oliver, R. L. (2014). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer (2nd Edition)*. New York: Routledge.
- pasha, F. G. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Tranformasi Digital Sertipikat Analog Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. *repository.stpn*, 1-48.
- Putri, D. A. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *repository.stpn*, 1-65.

- Rachman, A. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik . *Mulawarman Law Review*, 91-104.
- Rahma, T. I. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1, 642–661.
- Rahma, T. I. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH). *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1, 642–661.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Robbins, S., & Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT TANAH DI ERA 4.0. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1*, 16-24.
- Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertipikat Tanah di Era 4.0. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1*, 16-24.
- Setiawati, D., Danar P., N., Natasha, B. B., & Nuralisha, M. A. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Agraria: Penyuluhan tentang E-Sertifikat Tanah di Desa Gedangan, Sukoharjo. *Borobudur Journal on Legal Services Vol. 2 No. 2*, 51-60.
- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanta, E. (2004). *Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Uno, H. B. (2021). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.

Peraturan Peraturan

- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 Tentang Sertipikat Elektronik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik